

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

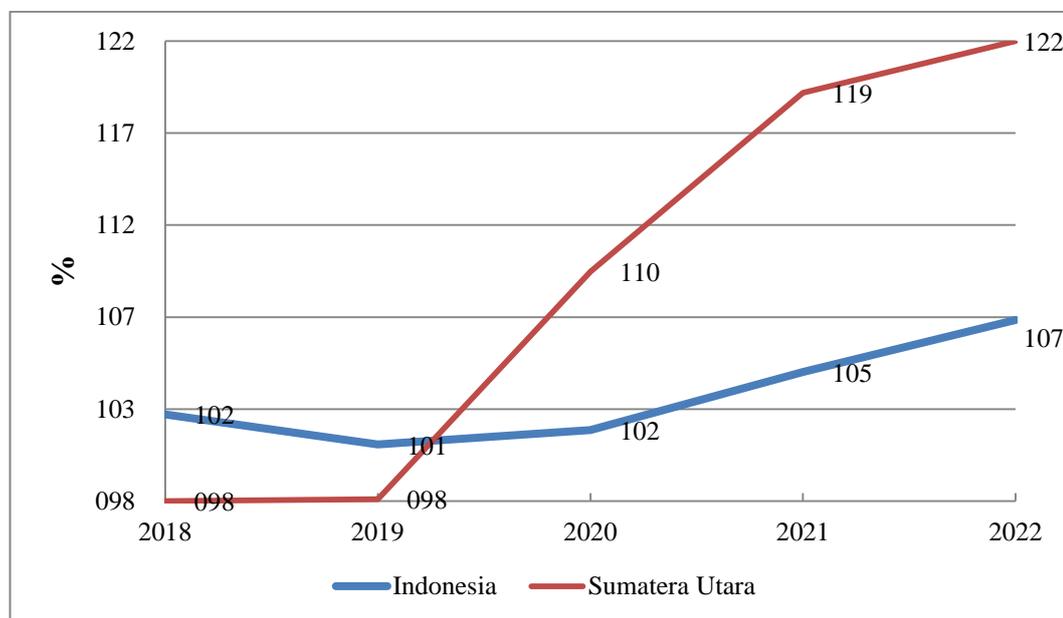
Pembangunan di segala bidang merupakan arah dan tujuan kebijakan Pemerintah Indonesia. Hakikat sosial dari pembangunan itu sendiri adalah upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menduduki peranan yang strategis karena sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif, baik secara lapangan usaha maupun distribusinya terhadap perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2023. Pertanian sebagai sektor yang paling dominan dengan angka pertumbuhan sebesar 0,34% serta kontribusi yang mencapai 11,7%. Sektor pertanian pada triwulan I, 2023 berhasil masuk pada posisi empat besar sektor paling berkontribusi yang tumbuh bersama sektor industri, pertambangan dan juga sektor konstruksi (BPS, 2023a)

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Selain sebagai penyedia kebutuhan pangan, sektor pertanian juga sebagai penyedia bahan baku industri. Sektor ini diharapkan dapat menjadi salah satu penunjang meningkatkan kesejahteraan petani terutama di wilayah pedesaan menjadi fokus pembangunan pertanian karena sektor pertanian menjadi basis pertumbuhan ekonomi pedesaan (Kusumawardhani, 2017).

Salah satu indikator yang dinilai relevan untuk menilai kondisi kesejahteraan petani adalah melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP berkaitan

dengan daya beli petani dalam hal membiayai kebutuhan rumah tangganya. Jika pendapatan petani lebih besar dari kenaikan harga produksi pertanian dan berdampak pada daya belinya, hal ini akan mengindikasikan bahwa kemampuan petani menjadi lebih baik atau terjadi kenaikan pendapatannya. Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Semakin tinggi nilai NTP menunjukkan semakin baik kemampuan tukar produk yang dihasilkan petani (BPS, 2023b).

Data perkembangan NTP di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : BPS, 2023b

Gambar 1.1. Perkembangan NTP Sub Sektor Pertanian di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1. di atas dapat dilihat bahwa nilai NTP di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara meningkat setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun terakhir. Dari data tersebut bahwa NTP paling rendah terjadi pada tahun 2018 dan 2019, yakni sebesar 102,46 dan 100,90 di Indonesia sedangkan di Sumatera Utara sebesar 97,98 dan 98,08. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit, artinya kenaikan harga barang produksi petani relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi petani. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani periode sebelumnya. Pada tahun 2019 nilai NTP pertanian Indonesia dan Sumatera Utara mengalami penurunan hal tersebut disebabkan karena berkurangnya indeks harga dari hasil produksi pertanian yang dihasilkan, hal ini terjadi dipengaruhi berbagai faktor diantaranya seperti persaingan pasar internasional, perubahan harga komoditas dan permintaan global yang berubah.

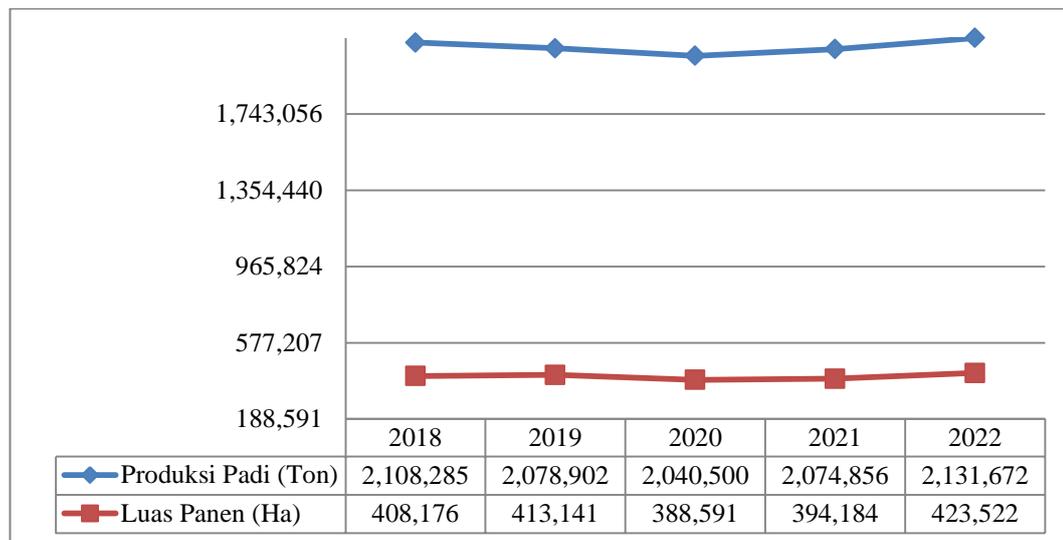
Selanjutnya NTP tahun 2020-2022, yaitu masing-masing sebesar 101,65, 104,64 dan 107,33 di Indonesia dan di Sumatera Utara 109,83, 119,86 dan 121,73 mengalami peningkatan dibanding NTP tahun 2018 dan 2019. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus, harga produksi petani naik lebih besar daripada harga barang yang dikonsumsi petani.

Sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan negara di Indonesia, dimana sektor pertanian menjadi sektor yang menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh wilayah di Indonesia. Namun sektor pertanian sebagai penentu kekuatan suatu negara seperti di Indonesia sektor ini juga mengalami berbagai permasalahan, salah satu diantaranya, yaitu masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani, masalah pemodal, akses ke lembaga pembiayaan, akses

pasar, daya saing, kekuatan hukum dan sosial, kelestarian lingkungan (Nuswardani, 2019).

Kementerian Pertanian (2017), mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin lebih banyak bekerja pada sektor pertanian, yaitu sebesar 33% dan penduduk miskin pada non sektor pertanian, yaitu sebesar 28% serta sisanya sebanyak 39% tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan petani yang bekerja pada sektor pertanian belum dapat menyediakan kehidupan yang sejahtera. Melihat kondisi kesejahteraan petani yang belum baik, maka pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan para petani dengan memperhatikan dampak dari setiap kebijakan. Apabila tingkat kesejahteraan secara terus menerus belum baik maka secara jangka panjang faktor-faktor produksi di dalam usaha pertanian menjadi terganggu baik disisi produksi maupun pendapatan petani yang bekerja pada sektor pertanian.

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, salah satu diantaranya adalah subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan merupakan subsektor yang memiliki peran yang lebih besar dibanding subsektor lain dan hasil komoditas sub sektor tanaman pangan paling sangat penting untuk hajat hidup masyarakat, seperti padi, jagung, dan lain-lain. Berbicara tentang tanaman pangan secara nasional, salah satu komoditi penting ialah padi yang menjadi makanan pokok sebagian besar penduduk. Berikut perkembangan produksi dan luas panen Padi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.



Sumber : BPS, 2023c

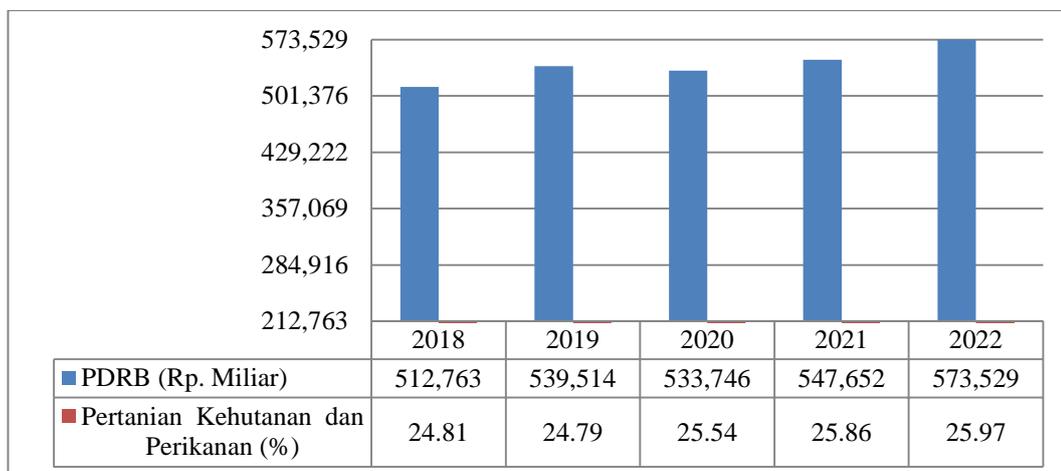
Gambar 1.2. Perkembangan Produksi dan Luas Panen Padi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Dalam beberapa tahun terakhir, secara umum perkembangan produksi komoditas tanaman padi di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 2018 sampai dengan 2022 mengalami tren naik dan turun, produksi tertinggi tahun 2022, yakni sebesar 2.131.672 Ton dan terendah tahun 2020, yaitu sebanyak 2.040.500 Ton, cenderung stagnan. Produksi padi pada dasarnya merupakan hasil kali luas panen padi dengan produktivitas padi per hektar lahan, sehingga seberapa besar produksi tergantung berapa luas panen pada tahun tersebut. Data tersebut memperlihatkan bahwa cara dan teknologi yang digunakan untuk bercocok tanam tiap tahun tidak jauh berbeda dan belum stabil, sehingga hasil produksi padi per hektar terus berfluktuasi.

Luas panen padi di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami tren naik dan turun. Luas panen tertinggi tahun 2022, yakni seluas 423.522 ha dan terendah tahun 2020, yaitu seluas 388.591 Ha, cenderung stagnan. Penurunan luas panen pada tahun 2020 disebabkan karena

berbagai faktor, seperti pembangunan yang menggunakan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian karena peningkatan jumlah penduduk setiap tahun yang menyebabkan permintaan terhadap lahan perumahan, infrastruktur, pengembangan industri dan lain-lain meningkat.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar bagi pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara dibandingkan sektor yang lainnya. Berikut perkembangan PDRB dan kontribusi sektor pertanian dan kehutanan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.



Sumber : BPS, 2023c

Gambar 1.3. Perkembangan PDRB dan Kontribusi terhadap Pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

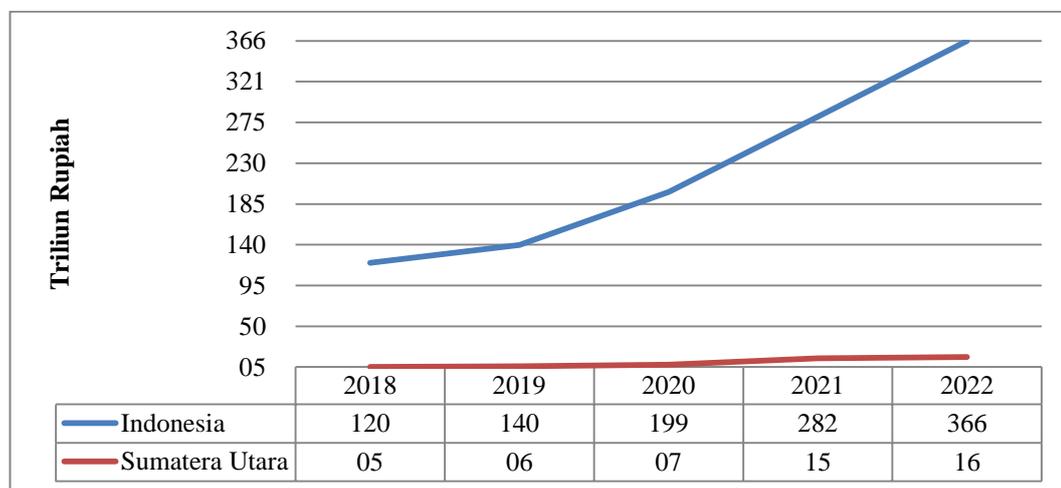
Dari data di atas menunjukkan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2018 – 2022 setiap tahunnya mengalami tren naik dan turun, PDRB tertinggi tahun 2022, yakni

sebesar Rp. 573.529 Miliar dan terendah tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 512.763 Miliar. Tahun 2020 PDRB mengalami penurunan yang disebabkan oleh dampak Covid-19. Sedangkan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam pembentukan PDRB yang tertinggi adalah pada tahun 2022, yaitu sebesar 25,97% dan terendah pada tahun 2019, yaitu sebesar 24,79%. Rentang tahun 2019-2020 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tangguh (relatif tidak menurun kontribusinya) dalam pembentukan PDRB pada masa Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produksi petani, maka petani memerlukan pembiayaan dalam usaha tani. Pembiayaan usaha tani memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani dalam pembangunan pertanian. Meningkatkan kesejahteraan petani dan kinerja sektor pertanian memerlukan pembiayaan yang tidak hanya dapat menolong petani untuk mengolah pertaniannya, tetapi juga dapat menolong mereka dalam hal pelunasannya.

Mengingat arti peran kredit dalam pembangunan sektor pertanian, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong sektor pertanian adalah dengan memberikan akses permodalan kepada petani secara lebih luas melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini digulirkan pada tahun 2007 melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan didukung Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008–2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK/2008.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan permodalan pada usaha mikro dan kecil, yang secara ekonomi menguntungkan (*feasible*), namun belum layak dan memenuhi persyaratan perbankan komersial (*bankable*). Tujuan dari program KUR adalah untuk meningkatkan percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, mengurangi angka kemiskinan, serta memperluas kesempatan kerja. Berikut perkembangan KUR di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.



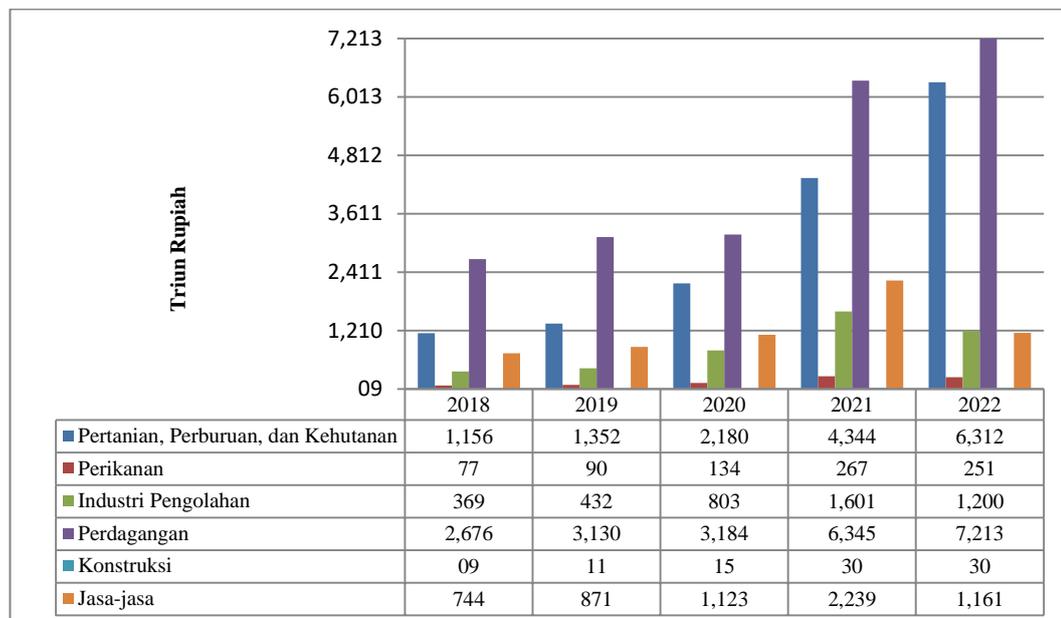
Sumber : Kemenko Perekonomian, 2023

Gambar 1.4. Perkembangan KUR di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, secara umum perkembangan realisasi penyaluran KUR di Indonesia terus mengalami peningkatan, yaitu tahun 2018 sebesar Rp. 120.3 triliun meningkat menjadi Rp. 365.6 triliun pada tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata sebesar 32,5% pertahun. Provinsi Sumatera Utara juga terus mengalami peningkatan, yaitu tahun 2018 sebesar Rp.5,0 triliun meningkat menjadi Rp. 16,2 triliun pada tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata sebesar 37,9% pertahun.

Berdasarkan data Susenas 2020-2022, kredit usaha yang diterima oleh anggota rumah tangga pertanian masih sangat kecil, yaitu kurang dari 30%, artinya rumah tangga pertanian masih banyak yang tidak menerima atau belum mendapatkan manfaat dari kredit usaha yang ada. Jenis kredit usaha yang terbanyak diterima anggota rumah tangga adalah jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selama periode tahun 2020-2022 rumah tangga berusaha di pertanian berkisar antara 7,33%- 9,57%. Data ini menunjukkan bahwa akses petani Indonesia terhadap KUR masih sangat rendah (Pusdatin Kementerian Pertanian, 2022).

Alokasi dana KUR ini didistribusikan melalui beberapa sektor ekonomi, yaitu; sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi dan Jasa-jasa. Berikut perkembangan alokasi dana KUR di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.



Sumber : Kemenko Perekonomian, 2023

Gambar 1.5. Perkembangan KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, secara umum perkembangan realisasi penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi di Provinsi Sumatera sebagian besar terus mengalami peningkatan. Dari 6 (enam) sektor ekonomi dalam penyaluran KUR ada 2 (dua) sektor yang dominan mengalami tren peningkatan, yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dan perdagangan. Untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, yaitu tahun 2018 sebesar Rp. 1,156 triliun meningkat menjadi Rp. 6,312,5 triliun pada tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata sebesar 59,2% pertahun. Sedangkan untuk sektor perdagangan tahun 2018 sebesar Rp.2,676 triliun meningkat menjadi Rp. 7,213 triliun pada tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata sebesar 39,3% pertahun.

Bergulirnya program KUR untuk membantu masyarakat dalam usaha taninya melalui fasilitas bantuan modal usaha. Diharapkan dengan bantuan pemerintah melalui KUR dapat meningkatkan produksi usaha tani dan kesejahteraan petani dalam mengembangkan usaha taninya, sehingga berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menilai penting untuk meneliti tentang “ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR PETANI DI SUMATERA UTARA”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, perlu diidentifikasi masalah yang dikaji. Hasil produksi tanaman padi yang dikelola petani masih rendah diikuti dengan Luas panen yang tersedia umumnya sangat sempit dan terbatas serta harga padi yang tidak stabil. Sempitnya luas panen tentu saja berimplikasi pada terbatasnya hasil panen yang diperoleh. Produksi padi yang rendah disebabkan keterbatasan finansial yang dimiliki petani dan petani sulit untuk mendapatkan pinjaman dalam rangka mengelola usaha tani tanaman padi serta berdampak terhadap NTP petani. Permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan finansial (bantuan finansial berupa pinjaman dalam jumlah tertentu kepada petani) untuk meningkatkan produksi padi, harga jual padi, PDRB dan Nilai Tukar Petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, namun kesejahteraan petani di Indonesia masih rendah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), luas panen, harga padi, dan PDRB serta Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), luas panen, harga padi, dan PDRB terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sumatera Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk.

1. Menganalisis perkembangan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), luas panen, harga padi, dan PDRB serta Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera Utara.
2. Menganalisis pengaruh pemberian KUR, luas panen, harga padi, dan PDRB terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung terkait didalamnya, adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai menambah wawasan dan sebagai bahan informasi bagi peneliti yang lain yang mengkaji mengenai Pengaruh pemberian KUR, luas panen, harga padi serta PDRB terhadap NTP di Provinsi Sumatera Utara.
 - 2) Bagi Penulis, penelitian ini sebagai mana aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori yang di peroleh, yaitu tentang Pengaruh pemberian KUR, luas panen, harga padi serta PDRB terhadap NTP di Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada petani dalam penggunaan kredit, sehingga mampu membantu petani memenuhi kebutuhan input dan meningkatkan produksi serta tingkat kesejahteraan.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu teori relevan yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sedang diajukan, dan penyusunan instrumen penelitian.

2.1.1. Petani

2.1.2. Pengertian Petani

Petani adalah orang yang mengusahakan pertanian dan mengelola tanah untuk menanam dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, dan buah-buahan. Yang diinginkan petani adalah mendapatkan hasil dari tanaman tersebut yang dapat digunakan sendiri ataupun dijual kepada orang lain. Petani juga dapat menyediakan bahan baku industri seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, kapas atau wol untuk tekstil, serta masih banyak lagi yang lainnya (Nuraini *et.al*, 2021). Ada beberapa kriteria petani yang dapat dibedakan yaitu: petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani penggarap, petani penggadaai, dan petani sebagai buruh tani. Petani juga merupakan pribadi individu dengan empat kemampuan penting untuk pengembangan pertanian, seperti: bekerja, belajar, berfikir secara imaginative dan kreatif, serta memiliki citacita.

2.1.3. Sektor Pertanian

Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan padahal kalau bila ditinjau lebih jauh kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi

pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian pertanian yang dalam arti luas tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan membudidayakan serta mengelola dibidang perternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti: ayam, bebek, angsa. Serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian (Bukhori, 2014).

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di Negara-Negara Berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini antara lain disebabkan beberapa faktor, yakni ; Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara. Kedua tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang yang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk pembangunan. Kelima, sektor ini merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan

pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan (Mardikanto, 2007).

Peran nyata sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten dengan mengembangkan ekonomi yang bersifat *resource based*. Atas dasar tersebut, potensi perekonomian pedesaan diharapkan akan menjadi determinan dari perekonomian nasional secara keseluruhan dan dengan demikian perubahan yang terjadi pada struktur perekonomian pedesaan perlu dicermati terutama dampaknya terhadap struktur kesempatan kerja dan pendapatan di wilayah pedesaan (Mubyarto, 2009).

2.1.4. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang telah dikembangkan sejak tahun 1980. NTP adalah indeks perbandingan antara harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang harus dibayarkan petani (Ib). Salah satu unsur yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani adalah kemampuan daya beli dari pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga petani. Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari peningkatan daya beli pendapatan petani untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila daya beli petani semakin tinggi terhadap barang yang dikonsumsi maka NTP semakin tinggi dan juga sebaliknya apabila daya beli petani semakin turun terhadap barang yang dikonsumsi maka NTP semakin turun. NTP juga berkaitan dengan hasil pertanian yang dihasilkan

kemudian dijual oleh petani dengan barang dan jasa yang dibeli petani atau dikonsumsi oleh petani (BPS, 2023b).

Selain fungsi NTP sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani, NTP juga digunakan untuk :

1. Mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga.
2. Memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.
3. Menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Petani yang dimaksud dalam konsep NTP oleh BPS adalah petani yang beraktivitas pada sub sektor tanaman pangan (padi, dan palawija , seperti ; jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan kacang ijo), hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan), tanaman perkebunan rakyat (kelapa, kopi, cengkeh, tembakau dan kapuk odolan), peternak (ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil peternakan serta sub sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya (BPS, 2023b).

2.1.5. Pengukuran Nilai Tukar Petani

NTP adalah indikator yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di daerah tertentu. NTP merupakan perbandingan antara Indeks yang diterima petani (It) dibandingkan dengan Indeks yang dibayarkan petani (Ib) yang dinyatakan dalam satuan persentase (%) (BPS, 2023b). Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk)

pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian (BPS, 2023b). Penyusunan dan penghitungan NTP diperoleh dari dua komponen indeks, yaitu Indeks yang Diterima Petani (I_t) dan Indeks yang Dibayar Petani (I_b), sehingga NTP dirumuskan dengan:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

1) Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t)

Indeks harga yang diterima petani merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga yang terjadi dalam satu periode dari suatu jenis produksi pertanian dengan tingkat harga tertentu dan periode tertentu. (I_t) digunakan untuk mengetahui fluktuasi harga barang yang dihasilkan oleh petani dan sebagai unsur dalam perhitungan pendapatan sektor pertanian. (I_t) memiliki rumus, yaitu:

$$I_t = \frac{\sum_i^m = 1 \frac{P_{t_{ti}}}{P_{t_{(t-1)i}}} P_{t_{(t-1)i}} Q_{oi}}{\sum_i^m = 1 P_{t_{oi}} Q_{oi}} \times 100\%$$

Dimana :

I_t = Indeks harga yang diterima petani.

$P_{t_{ti}}$ = Harga yang diterima petani bulan ke- t untuk jenis barang ke-i

$P_{t_{(t-1)i}}$ = Harga yang diterima petani pada bulan ke(t-1) untuk jenis barang ke-i

$\frac{P_{t_{ti}}}{P_{t_{(t-1)i}}}$ = Harga relatif yang diterima petani bulan ke- t dibanding ke- (t-1) untuk jenis barang ke-i

$P_{t_{oi}}$ = Harga yang diterima petani pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i

Q_{oi} = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
 m = Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

2) Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan indeks yang berfungsi untuk mengukur rata-rata terjadinya perubahan harga dalam suatu periode terhadap komoditas barang dan jasa produksi, tambahan terhadap barang modal, dan konsumsi rumah tangga petani. (Ib) berfungsi untuk melihat fluktuasi barang yang dikonsumsi rumah tangga petani atau barang produksi yang dihasilkan oleh petani. (Ib) memiliki rumus, yaitu:

$$Ib_t = \frac{\sum_i^m = 1 \frac{Pb_{ti}}{Pb_{(t-1)i}} Pb_{(t-1)i} Q_{oi}}{\sum_i^m = 1 Pb_{oi} Q_{oi}} \times 100\%$$

Dimana :

Ib_t = Indeks harga yang dibayar petani.

Pb_{ti} = Harga yang dibayar petani bulan ke- t untuk jenis barang ke-i

$Pb_{(t-1)i}$ = Harga yang dibayar petani pada bulan ke(t-1) untuk jenis barang ke-i

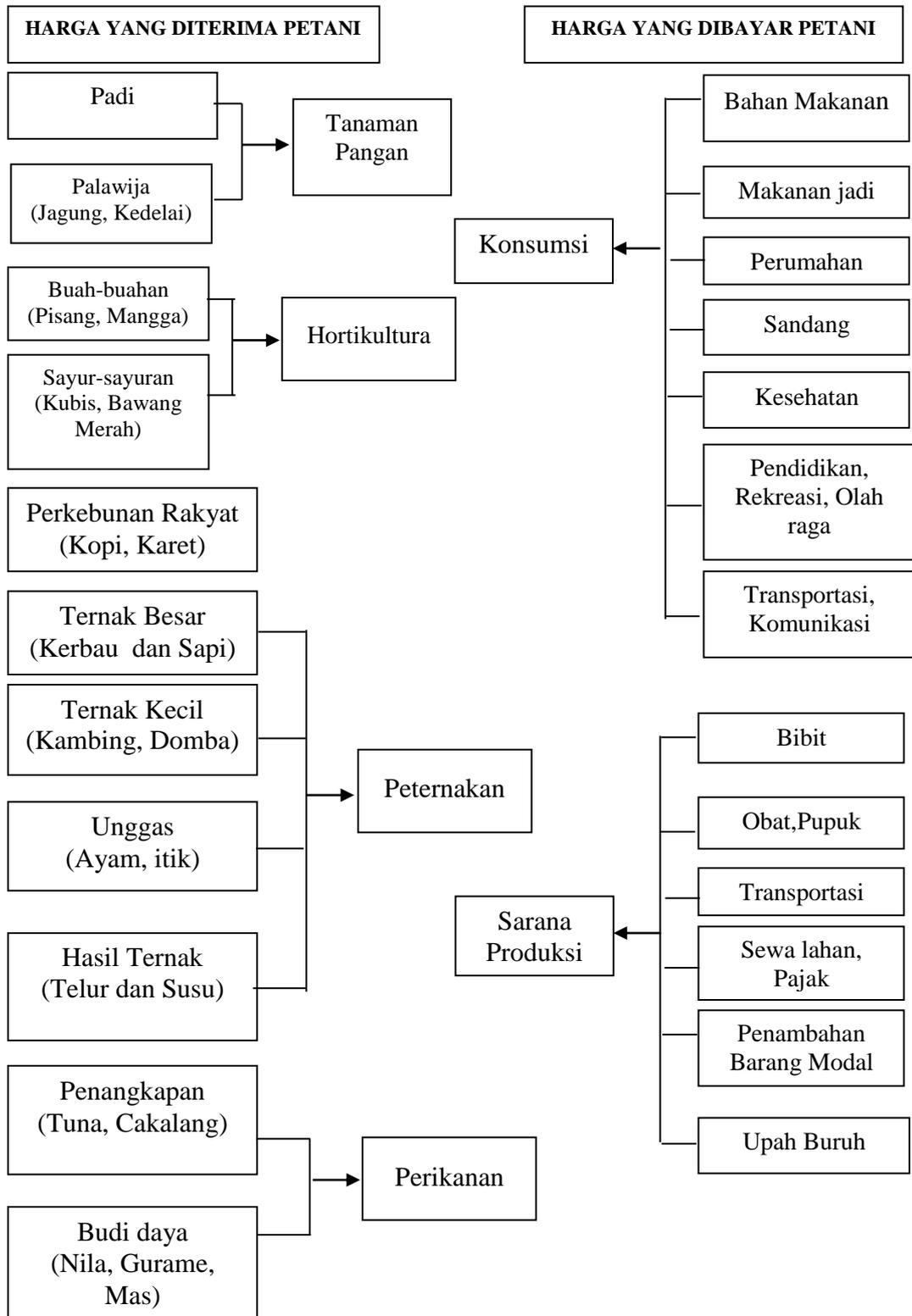
$\frac{Pb_{ti}}{Pb_{(t-1)i}}$ = Harga relatif yang dibayar petani bulan ke- t dibanding ke- (t-1) untuk jenis barang ke-i

Pb_{oi} = Harga yang dibayar petani pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i

Q_{oi} = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

m = Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Bentuk konsep NTP yang dikembangkan oleh BPS seperti pada Gambar



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023b

Gambar 2.1. Pembentukan NTP

Secara konsepsi Nilai Tukar Petani (NTP) adalah hasil dari setiap komponen pembentuk NTP, yaitu; apabila laju tukar komponen penerimaan petani lebih tinggi dari laju tukar komponen pengeluaran maka NTP akan meningkat dan juga sebaliknya (BPS, 2023b). Secara umum NTP memiliki tiga kategori, yaitu;

1. $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus, dimana harga barang produksi petani meningkat lebih besar dibandingkan dengan harga barang konsumsi petani. Pendapatan petani akan meningkat lebih besar dibandingkan pengeluarannya, sehingga kesejahteraan petani mengalami kenaikan.
2. $NTP = 100$ berarti petani mengalami keadaan impas atau *break even*. Dimana terjadi kenaikan atau penurunan harga barang produksi petani sama dengan kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi petani, sehingga kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Dimana terjadi kenaikan harga barang produksi petani lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi petani, sehingga kesejahteraan petani mengalami penurunan.

2.2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 pengertian kredit adalah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Peraturan Bank Indonesia, 2021).

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya (Kasmir, 2015)

2.2.2. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah program untuk usaha yang produktif dan layak tetapi memiliki kekurangan yang terdapat pada syarat kredit atau pembiayaan ataupun investasi. Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berarti sumber modal untuk pebisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pelengkap fasilitas dalam proses produksi. Tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil dalam rangka meningkatkan aksesibilitas kredit terhadap lembaga keuangan, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan lowongan pekerjaan, jumlah barang dan jasa, peredaran dan lalu lintas uang, pemerataan pendapatan serta stabilitas ekonomi (Kasmir, 2015).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan

bagi pelaku usaha. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank (Sujarweni, 2015).

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 Mengenai fasilitas penjaminan kredit usaha umum, mendefinisikan KUR adalah “kredit atau hibah kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berupa modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan bagi perusahaan manufaktur. Kredit Korporasi Rakyat (KUR) adalah pemberian kredit/ekuitas bekerja dan/atau berinvestasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah; dan koperasi (UMKMK) di wilayah usaha yang efisien dan layak tapi belum bisa ke bank (kekurangan agunan). dengan Limit kredit hingga Rp. 500.000.000, (lima ratus juta won) rupiah) dijamin oleh perusahaan penjamin. Penyaluran KUR akan membantu mengembangkan usaha produksi di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan dan sektor industri. Modal penyaluran KUR adalah 100% dana dari Bank Pelaksana. KUR dibagikan oleh Bank pelaksana dijamin otomatis (*automatic hedging*) oleh Perusahaan penjaminan dengan nilai jaminan 70% dari pagu KUR. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai modal kerja dan didukung oleh fasilitas penjaminan bagi perusahaan manufaktur (Peraturan Menteri Keuangan, 2008).

Periode Kredit dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kredit jangka pendek, berlangsung selama satu tahun.
- 2) Pinjaman jangka menengah, dengan jangka waktu mulai dari satu tahun hingga dengan tiga tahun.

3) Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu pembayaran selama tiga tahun. IBR unit (sebagai tingkat bunga yang akan ditanggung peminjam) menyediakan jangka waktu untuk pelunasan kredit tergantung pada jenis pinjaman

2.2.3. Tujuan KUR

Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16% per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70% dari alokasi total kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas *on-farm*, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian (Undang-Undang Nomor 20 Tahun, 2008).

Tujuan dari program KUR adalah untuk mempercepat mengembangkan bidang-bidang utama dan memberdayakan perusahaan skala besar kecil, untuk meningkatkan akses ke kredit dan lembaga keuangan, mengurangi kemiskinan

dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya KUR adalah modal kerja dan Kredit investasi yang khusus diberikan kepada unit usaha efektif melalui program penjaminan kredit. Adanya program KUR pemerintah melalui Perbankan nasional diharapkan memiliki latar belakang perbankan dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat mikro, kecil dan menengah. Tujuan yang ingin dicapai oleh program pemberdayaan masyarakat dengan program KUR ini, yaitu: Bisnis apa pun dengan ukuran apa pun memiliki akses ke modal. Dengan cara ini, arus barang dan jasa secara keseluruhan meningkat menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2019).

2.2.4. Manfaat KUR

Dilihat dari sisi perbankan, penyaluran KUR dapat memberikan beberapa manfaat yang dibagi menjadi tiga hal, yaitu:

- a. KUR dapat meningkatkan laba, namun tidak signifikan karena kecilnya nilai kredit KUR dibandingkan total kredit secara keseluruhan serta adanya kesulitan penyaluran KUR karena minimnya nasabah yang memenuhi syarat dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bank dalam penetrasi pasar ke kredit UMKM.
- b. KUR dapat meningkatkan permintaan UMKM walaupun tidak perlu signifikan.
- c. Pengaruh KUR rasio *Non Performing Loan* (NPL) KUR pada perbankan rata-rata kurang dari 1% dari total kredit mengingat kecilnya nilai kredit dan tingginya seleksi nasabah, namun ada beberapa bank yang tingkat NPL nya mencapai 10% dari total kredit pertanian (Undang-Undang Nomor 20 Tahun, 2008).

Kendala yang dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan KUR adalah sulitnya memperoleh calon debitur yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh bank dan kerjasama dengan lembaga penjamin masih belum jelas. Sedangkan pada sisi UMKM, penyaluran KUR telah memberikan kesempatan pada pengusaha untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih besar. Selain itu KUR juga menyebabkan peningkatan pemanfaatan tenaga kerja dan kesejahteraan UMKM.

2.2.5. Landasan KUR

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*. Landasan operasional KUR adalah Intruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin percepatan pelaksanaan KUR dan MoU antara Departemen Teknis/Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan), Perusahaan Penjaminan, dan Perbankan (Inpres No 5 Tahun, 2018). Selain itu, KUR diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat tambahan peraturan terkait program KUR sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran.

2.2.6. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 (Peraturan Menteri Keuangan, 2008). Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (*bankable*) dengan ketentuan:

- a) Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.
 - b) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - c) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
- 2) KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
- a) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara dengan 20-21% efektif pertahun.
 - b) Untuk kredit diatas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 12-13% efektif pertahun.
- 3) Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas

perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Ada tiga fitur atau karakter utama KUR, yaitu:

- a. Pinjaman modal kerja dan dana investasi. Skema KUR adalah modal kerja dan dana investasi untuk unit usaha produktif.
- b. Pengusaha, target pinjaman nasabah ini adalah pemilik bisnis perseorangan dengan kebutuhan kredit maksimum Rp 200.000.000.
- c. Margin subsidi pemerintah dan bebas biaya admin atau provisi . Pinjaman ini disubsidi pemerintah dan dijamin oleh asuransi kerugian kredit oleh perusahaan asuransi BUMN.

2.2.7. Jenis-Jenis KUR

Peraturan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2015, membagi Kredit usaha rakyat (KUR) dilaksanakan dalam tiga skim. Adapun yang membedakan skim satu dengan lainnya adalah jumlah plafon.

1. KUR Ritel : plafon sampai dengan Rp 500 juta dilayani di kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
2. KUR Mikro iB : plafon kredit sampai dengan Rp 25.000.000 per debitur.
3. Mikro iB: plafon pinjaman maksimum sampai dengan Rp 200.000.000 per debitur.

2.2.8. Penyalur dan Penjamin KUR

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2021, mengeluarkan Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah kembali menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa ke masa menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat.

Dari sisi penjaminan, program KUR juga didukung dengan 10 lembaga penjamin kredit. Kehadiran penjaminan pada program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka menjaga praktik *Good Corporate Governance* dalam penyaluran KUR, Pemerintah senantiasa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mengawasi pelaksanaan KUR.

2.3. Produksi

Produksi adalah proses penggabungan masukan (*input*) dan mengubahnya menjadi keluaran (*output*). Teknologi produksi menghubungkan masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Kualitas masukan (*input*) tentu diperlukan untuk memproduksi setiap jasa atau barang tertentu. Hubungan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) artinya, teknologi produksi yang dinyatakan secara numerik atau matematis disebut fungsi produksi (atau fungsi produksi total). Fungsi produksi menunjukkan unit total produk sebagai fungsi dari masukan (*input*) (Case dan Fair, 2016). Dalam proses produksi, produsen akan mengubah

masukan (input) menjadi faktor-faktor produksi (*factor of production*) yang digunakan pada seluruh proses produksi (Pindyck dan Rubinfeld, 2013).

Fungsi Produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan (fungsional) antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Q = f (K, L, R, T)$$

Dimana:

Q = Output;

K = Kapital/modal;

L = Labor/tenaga kerja;

R = Resources/sumber daya;

T = Teknologi

Soekartawi (2011), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan korbanan produksi. Faktor produksi memang sangat menentukan besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Faktor produksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting. Hubungan antara faktor produksi (*input*) dan produksi (*output*) biasanya disebut dengan fungsi produksi atau faktor relationship.

Dalam faktor produksi (input) digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Input tetap (*fixed input*)

Faktor produksi yang kuantitasnya tidak berpengaruh terhadap output, seperti bangunan gedung. Walaupun output turun sampai nol, input akan selalu ada.

2. Input variabel (*variabel input*)

Output yang dipengaruhi langsung oleh kuantitasnya terhadap faktor-faktor produksi. Seperti bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan keluaran atau produk.

2.4. Luas Panen

Luas panen adalah luas tanaman (padi) yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur yang digunakan petani untuk melakukan usahatani padi selama satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan hektar (ha). Menurut Mubyarto (2009), luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi tempat penanaman atau mengerjakan proses penanaman, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Luas panen atau lahan yang digunakan pada pertanian dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penunjang yang terpenting dalam sektor pertanian dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Jika luas lahan meningkat maka pendapatan petani akan meningkat, demikian juga sebaliknya. Sesuai dengan pendapat Soekartawi (2011) bahwa semakin luas lahan yang diusahakan petani, maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai dengan pengolahan lahan yang baik.

Sering dijumpai makin luas areal panen yang dipakai untuk pertanian akan semakin tidak efisien lahan tersebut. Sebaliknya luas areal panen yang sempit, upaya pengusaha terhadap penggunaan faktor produksi semakin baik, penggunaan

tenaga kerja yang tercukupi dan tersedianya modal yang tidak terlalu besar, sehingga usaha pertanian yang seperti ini sering lebih efisien (Daniel, 2004).

Jika luas lahan meningkat maka pendapatan petani akan meningkat demikian juga sebaliknya. Hubungan antara luas lahan dengan pendapatan petani merupakan hubungan yang positif. Sektor pertanian berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDRB, perolehan devisa, penyediaan pangan, dan bahan industri, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda kedepan yang besar melalui keterkaitan input-output antara industri, konsumsi, dan investasi. Hal ini terjadi nasional dan regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah sektor pertanian (Laoh, 2008).

2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang atau jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki memiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut (BPS, 2023d).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang penting dalam pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tertentu dan didalam suatu periode tertentu (setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah, ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

- a. PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu menunjukkan nilai tambah suatu barang dan jasa yang dapat dihitung menggunakan harga pada satu periode yang sedang berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, dan struktur ekonomi suatu daerah.
- b. PDRB atas dasar harga konstan, yaitu menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu periode tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun (BPS, 2023d).

2.6. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen di manipulasi/dirubah-ubah atau dinaik turunkan. Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Regresi linier terbagi menjadi regresi linier sederhana dan regresi linier ganda. Regresi Linier Sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2010).

2.6.1. Model Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi, meramal atau menduga pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

dimana ;

Y = Variabel terikat (Respon)

X = Variabel Bebas (Prediktor)

a = Konstanta (Intercept)

b = Koefisien (Slope)

2.6.2. Model Regresi Berganda

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/ response (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/prediktor (X_1, X_2, \dots, X_n). Secara umum analisis regresi berganda dapat ditulis dengan persamaan;

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

dimana ;

Y = Variable Tak Bebas (nilai variabel yang akan diprediksi)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ = Koefisien Regresi

X_1, X_2, \dots, X_n = Variable Bebas

ε = *Random error*

2.7. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Nama penulis dan tahun penelitian	Kurniawan (2022)
Judul	Nilai Tukar Petani sebagai Indikator Kesejahteraan Petani Kedelai di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan
Tujuan penelitian	Untuk: 1. Mengetahui rata-rata nilai tukar petani kedelai. 2. Mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani kedelai
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan usahatani lainnya, pengeluaran pangan, pendapatan non pertanian dan pengeluaran non pangan dan umur berpengaruh signifikan sedangkan Pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan usahatani secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani.
2. Nama penulis dan tahun penelitian	Afifah dan Nalurita (2022)
Judul	Analisis Determinan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Indonesia
Tujuan penelitian	Untuk: 1. Menganalisis Determinan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Indonesia dengan variabel NTP, PDB tanaman pangan, harga jagung, kredit pertanian, dan pupuk organik
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi data panel.
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB tanaman pangan, harga jagung, kredit pertanian, dan realisasi pupuk organik berpengaruh signifikan terhadap indeks NTP.
3. Nama penulis dan tahun penelitian	Haris (2021)
Judul	Pengaruh Kebijakan Subsidi terhadap Produksi dan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 2006-2019
Tujuan penelitian	Untuk Menganalisis Pengaruh Kebijakan Subsidi terhadap Produksi dan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 2006-2019
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis <i>two stage least square</i> dengan data <i>time series</i> tahun 2006-2019.
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kebijakan subsidi pupuk berpengaruh positif terhadap produksi petani tanaman pangan dan berpengaruh negatif terhadap NTP tanaman pangan, (2) kebijakan subsidi kredit berpengaruh positif terhadap produksi dan NTP tanaman pangan, (3) kebijakan subsidi energi tidak berpengaruh terhadap produksi dan NTP tanaman pangan, serta (4) produksi tanaman pangan berpengaruh positif terhadap NTP tanaman pangan.

Tabel 2.1. Lanjutan

4. Nama penulis dan tahun penelitian	Bangun (2021)
Judul	Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (Bank Mandiri KCP Medan Brahrang) terhadap Produksi Usahatani Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat
Tujuan penelitian	Untuk: 1. Menganalisis proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada petani kelapa sawit di Kabupaten Langkat. 2. Menganalisis pengaruh pemberian kredit usaha rakyat (KUR), luas lahan, pupuk, dan pestisida terhadap produksi usahatani kelapa sawit di Kabupaten Langkat
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR, Luas lahan, dan Pupuk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Pestisida berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produksi usahatani kelapa sawit.
5. Nama penulis dan tahun penelitian	Iztiyar (2018)
Judul	Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian di Indonesia
Tujuan penelitian	Untuk: 1. Mengetahui bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kemiskinan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM, Nilai Output UMKM dan PDRB.
6. Nama penulis dan tahun penelitian	Kaya dan Kadanali (2022)
Judul	Hubungan antara produksi pertanian dan pinjaman pertanian untuk kelompok sektor perbankan di Turki
Tujuan penelitian	Untuk mengetahui hubungan antara produksi pertanian dan pinjaman pertanian
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian pinjaman pertanian berpengaruh terhadap produksi pertanian.

Tabel 2.1. Lanjutan

7. Nama penulis dan tahun penelitian	Lakhan <i>et al.</i> , (2020)
Judul	Kendala Kredit dan Kesejahteraan Petani Pedesaan dalam Ekonomi Agraris
Tujuan penelitian	Untuk: 1. mengetahui dampak kendala kredit terhadap kesejahteraan petani gandum
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kredit berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan pendapatan petani. (2) Kesejahteraan dan pendapatan petani yang terkendala kredit dipengaruhi oleh umur, tingkat suku bunga, luas lahan, dan jumlah anggota keluarga.
8. Nama penulis dan tahun penelitian	Chandio <i>et al.</i> , (2020)
Judul	Penilaian Kredit Formal dan Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Pertanian di Pakistan
Tujuan penelitian	Untuk: 1. Mengetahui Dampak jangka pendek dan jangka panjang kredit formal, angkatan kerja dan perubahan iklim terhadap produksi pertanian
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis <i>autoregressive distributed lag</i> (ARDL)
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit formal, penggunaan teknologi (traktor), dan angkatan kerja mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap produksi pertanian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
9. Nama penulis dan tahun penelitian	Martey <i>et al.</i> , (2019)
Judul	Dampak kredit terhadap efisiensi teknis rumah tangga penghasil Jagung di Ghana Utara
Tujuan penelitian	Untuk mengetahui dampak kredit terhadap efisiensi teknis rumah tangga petani kecil penghasil Jagung
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Kredit produksi berdampak positif terhadap efisiensi teknis petani kecil. (2) Akses terhadap kredit produksi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pasar dan layanan penyuluhan, jarak ke pasar, indeks aset dan fragmentasi lahan

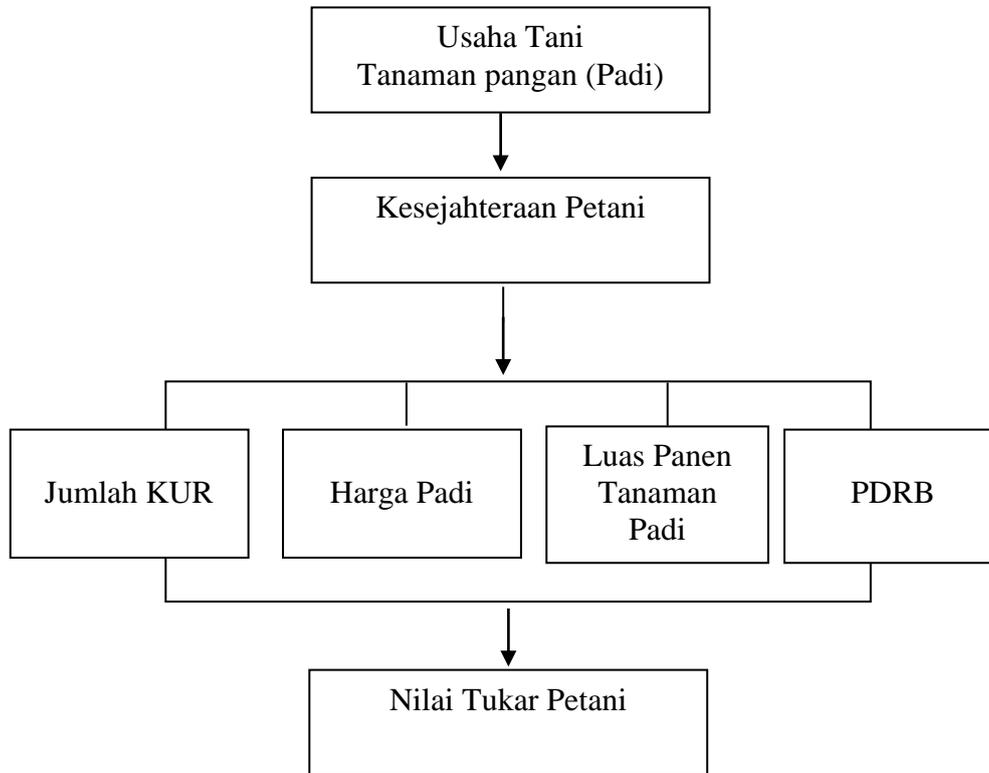
Tabel 2.1. Lanjutan

10. Nama penulis dan tahun penelitian	Indah <i>et al.</i> , (2023)
Judul	Pengaruh Inflasi, PDRB, Suku Bunga Dan Tenaga Kerja Terhadap Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung
Tujuan penelitian	Untuk: 1. Menganalisis Pengaruh Inflasi, PDRB, Suku Bunga Dan Tenaga Kerja Terhadap Nilai Tukar Petani
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi, tenaga kerja, PDRB, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Lampung.
11. Nama penulis dan tahun penelitian	Khoirunnisa (2024)
Judul	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan di Pulau Jawa
Tujuan penelitian	Untuk: 1. Menganalisis dari Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman pangan yang berada di Pulau Jawa tahun 2013-2022
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas panen padi dan upah buruh tani berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap NTP subsektor tanaman pangan di Pulau Jawa. PDRB pertanian dan inflasi tidak berpengaruh terhadap NTP subsektor tanaman pangan di Pulau Jawa
12. Nama penulis dan tahun penelitian	Annisa dan Chandriyanti (2021)
Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2018.
Tujuan penelitian	Untuk: 1. Menganalisis pengaruh luas panen, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap nilai tukar petani di Provinsi Kalimantan Selatan.
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas panen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NTP; pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NTP; Adapun luas panen, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NTP.

2.8. Kerangka Berpikir

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui kemampuan daya beli dari pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga petani, sehingga tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari peningkatan daya beli atas pendapatan petani untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila daya beli petani semakin tinggi terhadap barang yang dikonsumsi maka NTP semakin tinggi dan juga sebaliknya apabila daya beli petani semakin turun terhadap barang yang dikonsumsi maka NTP semakin turun. NTP juga berkaitan dengan harga hasil produksi tanaman yang dihasilkan kemudian dijual oleh petani dengan barang dan jasa yang dibeli petani atau dikonsumsi oleh petani.

Kemudian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan pemerintah akan berdampak terhadap sektor pertanian baik terhadap produksi maupun terhadap tingkat kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan petani merupakan tujuan utama yang akan menunjukkan kualitas suatu pertumbuhan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini selain menganalisis bagaimana pengaruh dari pemberian KUR juga dikaji tentang luas panen tanaman padi, harga padi serta PDRB terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) secara agregat. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat diilustrasikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

Diduga pemberian KUR, luas panen, harga padi, dan PDRB berpengaruh terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sumatera Utara.